

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan penduduk terbanyak setelah Republik rakyat Cina, India dan Amerika Serikat. Bertambahnya jumlah penduduk secara langsung dipengaruhi oleh kondisi fisik, sosial dan ekonomi wilayah setempat (Putri et al., 2023). Dengan luasnya negara Indonesia yang tetap dan jumlah penduduk yang terus bertambah dapat mengakibatkan kepadatan penduduk di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Tiap Tahun Di Indonesia

Jumlah Penduduk Di Indonesia Tiap Tahun		
2021	2022	2023
272 682,5	275 773,8	278 696,2

Sumber: Badan Pusat Statistik

Menurut tabel diatas menunjukkan bahwas tiap tahun penduduk di Indonesia mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah penduduk tertinggi sering terjadi terutama diperkotaan yang mengalami perkembangan cukup pesat. Hal itu dikarenakan tingkat urbanisasi dari daerah pedesaan ke kota yang sangat tinggi dan keterbatasan lahan yang tersedia. Dampak dari adanya urbanisasi sangat terasa oleh masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di permukiman perkotaan. Secara umum permukiman di perkotaan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu permukiman yang layak huni dan permukiman yang kurang layak huni. Mereka yang tinggal di permukiman layak huni adalah mereka yang mempunyai kondisi ekonomi menengah ke atas, sedangkan yang menempati permukiman yang kurang

layak huni adalah mereka yang mempunyai ekonomi menengah kebawah. (Wahyu Saputra et al., 2022).

Seiring dengan perkembangan yang begitu pesat di Indonesia tidak terlepas dari permasalahan permukiman kumuh. Mengingat permukiman kumuh di Indonesia masih terbilang cukup tinggi sehingga perlu adanya penanganan langsung dari pemerintah. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR mencatat, masih ada 4.170 hektare permukiman kumuh di seluruh Indonesia yang harus ditata dan ditangani” (Sumber: <https://lestari.kompas.com/read/2023/05/25/143000686/1-miliar-orang-di-dunia-tinggal-di-permukiman-kumuh-bagaimana-indonesia-?page=all>, diakses pada 20 Oktober 2023)

Berdasarkan berita yang dikutip dari kompas.com menjadi bukti bahwa fenomena permukiman kumuh di Indonesia masih menjadi permasalahan yang hingga saat ini belum terselesaikan. Terlihat masih terdapat 4.170 hektar yang perlu ditangani. Dalam menghadapi permasalahan tersebut pemerintah Indonesia berkomitmen mengaitkan agenda pembangunan nasional dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020-2024. Terdapat 17 tujuan dan 169 indikator SDGs yang disesuaikan dan diintegrasikan dengan RPJMN 2020-2024, salah satu tujuannya adalah untuk membuat kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan (Rahmawati, 2020).

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia setelah sandang dan pangan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 28 H Amandemen UUD 1945, rumah adalah salah satu hak dasar setiap rakyat Indonesia, maka setiap warga

negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Rumah bisa dikatakan sehat jika rumah tersebut mempunyai persyaratan-persyaratan tertentu tidak harus besar dan mewah, tetapi rumah yang sehat yang memenuhi kriteria sebagai berikut yaitu mempunyai sirkulasi udara yang baik, mempunyai pencahayaan dan penerangan yang cukup, mempunyai air bersih yang cukup dan terpenuhi, mempunyai saluran pembuangan air limbah yang diatur dengan baik dan tidak menimbulkan pencemaran, mempunyai lantai yang tidak licin, dinding yang tidak lembab dan tidak terpengaruh pencemaran seperti bau, rembesan air kotor dan licin (Rosalina et al., 2023). Pada dasarnya setiap masyarakat membutuhkan rumah yang layak huni, namun dalam kenyataannya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni tersebut menjadi masalah bagi sebagian masyarakat.

“Menurut Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan bahwa jumlah rumah tangga yang belum menempati rumah layak huni masih 40-50 %. Pemerintah menargetkan pada 2024 jumlahnya masyarakat yang tinggal layak huni bisa mencapai 70%, ujarinya di Jakarta Minggu (15/1/2023).” (sumber: <https://investor.id/business/319106/50-rumah-tangga-indonesia-belum-menempatirumah-layak-huni>, diakses pada 22 September 2023)

Dalam berita investor.id diatas Jenderal PUPR menyampaikan bahwa masih terdapat rumah tangga yang belum menempati rumah layak huni berjumlah sekitar 40-50% yang dimana merupakan angka yang cukup tinggi. Dikarenakan pertumbuhan rumah tangga baru di Indonesia mencapai 3,2 juta dan adanya pengaruh kondisi perekonomian Indonesia. Fenomena terkait kebutuhan rumah masih menjadi polemik di Indonesia terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah seperti yang dikutip dalam berita voaindonesia.com.

“Menteri PUPR mengatakan bahwa akses terhadap rumah layak ini masih belum bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama oleh

masyarakat yang berpenghasilan rendah, Indonesia Housing Forum Rabu 30/8 2023. (Sumber: <https://www.voaindonesia.com/a/juta-rumah-tangga-di-tanah-air-belum-miliki-rumah/7254800.html> diakses pada 9 Oktober 2023)

Berita diatas menjadi bukti bahwa masyarakat berpenghasilan rendah masih tinggal di rumah tidak layak huni dikarenakan akses terhadap rumah layak huni belum bisa terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Sehingga perlu adanya bantuan dari pemerintah untuk dapat menciptakan permukiman yang layak huni.

Sesuai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi negaranya dengan cara menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman agar warga Indonesia memiliki tempat tinggal yang bersih, sehat, aman harmonis, dan berkelanjutan. Perumahan dan Permukiman merupakan bagian yang sangat penting yang harus tetap dikembangkan dan ditingkatkan kembali secara lebih terarah dan terencana (Suci, 2022). Ketidakmampuan pemerintah dalam menangani permasalahan terkait rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah akan mendorong masyarakat membangun rumah dipermukiman yang tidak semestinya, seperti di pinggir sungai, area pembuangan sampah, bantaran rel kereta api, dan tempat lain yang tidak selayaknya berpenghuni. Jika permasalahan tersebut tidak segera diatasi akan berdampak negatif pada tatanan wilayah dan menumbuhkan area permukiman kumuh.

Permukiman kumuh diartikan sebagai permukiman yang terabaikan dari pembangunan kota dengan kondisi lingkungan permukiman yang mengalami penurunan kualitas bangunan, sosial ekonomi dan sosial budaya dan dihuni oleh

orang-orang miskin, penduduk yang padat, serta dengan sarana prasarana yang minim (Krisandriyana et al., 2019). Perumahan dan permukiman kumuh mencakup tiga hal yaitu: 1. Kondisi fisik seperti halnya bangunan yang terlalu rapat dan tidak terkelola dengan baik sampahnya, 2. Kondisi sosial, ekonomi yang tinggal di lingkungan tersebut. Kondisi sosial dan ekonomi yang tinggal di perumahan dan permukiman kumuh kebanyakan dari masyarakat berpenghasilan rendah, 3. Dampak dari kedua kondisi tersebut merupakan perilaku yang menyimpang, kondisi kesehatan masyarakat yang kurang baik, tempat penyebaran penyakit. Dampak lain dengan adanya permukiman kumuh secara khusus memberikan citra negatif pada pemerintah karena kurang mampunya dalam tatanan sosial budaya kemasyarakatan, masyarakat yang tinggal dipermukiman kumuh termasuk masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Permasalahan permukiman kumuh masih menjadi hambatan untuk perkembangan sebuah kota (Ghifari, 2021).

Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Surabaya juga menjadi ibu kota dari Provinsi Jawa Timur. Sebagai kota besar Surabaya terkenal sebagai kota metropolitan, dimana setiap tahunnya pasti terjadi peningkatan kepadatan penduduk. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin tinggi maka masalah yang terjadi semakin kompleks (Lukman et al, 2020). Dengan luas wilayah mencapai 374.36 km² dan jumlah penduduk yang telah mencapai angka 3 juta jiwa, membuat kota Surabaya menjadi kota yang padat. Adanya kepadatan penduduk yang tinggi dan padat di beberapa wilayah mendekati pusat kota menyebabkan terciptanya permukiman yang kumuh. Berikut merupakan data luas wilayah dan kepadatan penduduk menurut kecamatan Kota Surabaya.

Tabel 1.2 Jumlah Kepadatan Penduduk Di Surabaya Tahun 2022

Kecamatan	Kepadatan Penduduk Per Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)
Tegalsari	19.927	4.29
Genteng	11.375	4.05
Bubutan	21.854	3.86
Simokerto	30.571	2.59
Pabean Cantikan	10.222	6.8
Semampir	17.28	8.76
Kremlangan	12.71	8.34
Kenjeran	21.368	7.77
Bulak	5.587	6.27
Tambaksari	22.845	8.99
Gubeng	15.998	7.99
Rungkut	5.711	21.08
Tenggiling	13.093	5.52
Gunung Anyar	6.356	9.71
Sukolilo	5.057	23.68
Mulyorejo	6.655	14.21
Sawahan	24.845	6.93
Wonokromo	15.844	8.47
Karangpilang	7.89	9.23
Dukuh Pakis	6.472	9.94
Wiyung	5.462	12.46
Wonocolo	11.706	6.77
Gayungan	7.073	6.07
Jambangan	11.001	4.19
Tandes	9.254	11.07
Sukomanunggal	11.038	9.23
Asemrowo	2.759	15.44
Benowo	2.28	23.73
Pakal	2.088	22.07
Lakarsantri	2,695	18.99
Sambikerep	3.407	23.68

Sumber : bps.go.id

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Simokerto dengan total penduduk 30.571 jiwa dan luas wilayah 2.59 km. Yang kedua ialah kecamatan sawahan dengan jumlah penduduk 24.861 jiwa dengan luas wilayah 899 km. Dengan kepadatan penduduk dan luas wilayah diatas, tidak heran jika perbandingan wilayah tidak sebanding lurus dengan

jumlah penduduknya. Hal ini yang menyebabkan munculnya perumahan dan permukiman kumuh tercipta. Penyebab munculnya perumahan dan permukiman kumuh di Surabaya ialah pertumbuhan penduduk, mobilitas penduduk, urbanisasi, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Permukiman kumuh di perkotaan terjadi karena masih rendahnya penghasilan sebagian masyarakat (Izzatusholekha et al., 2023). Dalam mengatasi permukiman kumuh pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menurunkan angka permukiman kumuh.

Tabel 1. 3 Daftar Kawasan Prioritas Penataan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman di Kota Surabaya

No	Kecamatan	Kelurahan	Keterangan
1.	Wonokromo	Sawunggaling	Prioritas 1
2.	Bulak	Kenjeran	
3.	Bulak	Kedung Cowek	
4.	Bulak	Sukolilo Baru	
5.	Kenjeran	Bulak Banteng	
6.	Rungkut	Rungkut Kidul	
7.	Rungkut	Kalirungkut	
8.	Semampir	Wonokusumo	
9.	Semampir	Sidotopo	
10.	Gubeng	Airlangga	Prioritas 2
11.	Mulyorejo	Kalisari	
12.	Pakal	Benowo	
13.	Simokerto	Tambakrejo	
14.	Sukomanunggal	Putat Gede	
15.	Tenggiling Mejoyo	Kutisari	
16.	Krebangan	Morokrebangan	Prioritas 3
17.	Asemrowo	Asemrowo	
18.	Bubutan	Bubutan	
19.	Bubutan	Gundih	
20.	Bulak	Kenjeran	
21.	Gunung Anyar	Gunung Anyar Tambak	
22.	Semampir	Sidotopo	
23.	Tandes	Tandes	
24.	Wonokromo	Darmo	
25.	Krebangan	Dupak	
26.	Tandes	Karangpoh	

Sumber: RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 26 kelurahan di Surabaya yang menjadi prioritas dalam peningkatan perumahan dan permukiman. Kawasan prioritas di Kota Surabaya didasarkan pada potensi, karakteristik, dan persoalan yang memerlukan penanganan terlebih dahulu. Kawasan prioritas ditetapkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan kesepakatan dan kebutuhan yang disesuaikan dengan karakter Kota Surabaya. Suatu kawasan bisa dikategorikan kawasan prioritas apabila terdapat *urgensi* dalam penanganannya, adanya kontribusi dalam penanganan persoalan kota, adanya kesesuaian antara kebijakan pembangunan dengan pengembangan kota, adanya dominasi persoalan di bidang keciptakaryaan, adanya jaminan keberlanjutan program.

Gambar 1.1 Permukiman Kumuh Di Kota Surabaya



Sumber : Dokumen Pribadi

Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, Pemerintah Kota Surabaya mengagendakan terkait akses terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta permukiman kumuh. Rekomendasi yang dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kumuh melalui peremajaan, pemugaran dan

revitalisasi kawasan, Pengembangan dan pembangunan hunian vertikal (rusunawa dan rusunami), mengembangkan jaringan masyarakat dalam pengelolaan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) lingkungan pemukiman, Pemberian subsidi perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan meningkatkan bangunan rumah tidak layak huni melalui bedah rumah.

Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh menyatakan bahwa dalam mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman, maka perlu dilakukan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Salah satu program yang diselenggarakan oleh pemerintah kota surabaya yaitu program Rutilahu. Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) selain menjadi program untuk meningkatkan kualitas rumah bagi masyarakat yang tidak mampu memiliki rumah layak huni, juga sebagai salah satu program untuk mengurangi permukiman kumuh di Kota Surabaya. Karena dengan meningkatnya kualitas wilayah perumahan akan berdampak pada berkurangnya wilayah kumuh. hal tersebut juga disampaikan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam suarasurabaya.net yang menyatakan bahwa Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan manfaatnya karena dengan adanya program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) permukiman kumuh di Surabaya terus berkurang.

“Eri Cahyadi Selaku Walikota Surabaya dengan meyakinkan menyebut kekumuhan di Surabaya sudah nol. ”Berdasarkan data dari Direktorat

Jenderal Cipta Karya, Surabaya ini sudah nol kawasan kumuh. Parameter kumuh tidak hanya dari pandangan mata”. Sumber: <https://www.suararakyatjatim.com/2020/11/05/kawasan-surabaya-bebas-kumuh-dprd-faktanya-masih-ada-4356-hektare-tak-zero/> diakses pada 15 Oktober 2023

Akan tetapi faktanya masih terdapat 43,46 hektar permukiman kumuh di kota Surabaya. Hal tersebut dilansir dari berita suarajatim.com.

“Faktanya, masih ratusan ribu meter persegi permukiman di Surabaya belum bebas dari permukiman kumuh di Surabaya mencapai 43,46 ha (setara 434,600 meter persegi). Jumlah seluas itu, tersebar di 21 kelurahan”. Sumber: <https://www.suararakyatjatim.com/2020/11/05/kawasan-surabaya-bebas-kumuh-dprd-faktanya-masih-ada-4356-hektare-tak-zero/> diakses pada 9 Oktober 2023.

Dari berita diatas menunjukkan bahwasannya permukiman kumuh memang masih banyak dijumpai di Surabaya. Tidak sulit untuk menemukan. Seperti di belakang jalan-jalan protokol yang indah, banyak warga yang tinggal di rumah dengan kualitas yang buruk. Baik sirkulasi, sanitasi, maupun pelayanan dasar lainnya. Contohnya adalah pemukiman di Asemrowo. Salah satu program mengatasi permukiman kumuh adalah perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Ibnu Shobir anggota komisi D DPRD Surabaya, yang menyatakan.

“Salah satu program mengatasi permukiman kumuh adalah perbaikan rumah tidak layak huni Sumber: <https://www.suarasurabaya.net/politik/2020/klaim-kumuh-0-data-yang-disampaikan-eri-saat-debat-kurang-tepat/>

Berita tersebut menyatakan bahwa program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) menjadi salah satu program yang dapat mengurangi permukiman kumuh di Kota Surabaya.

Tabel 1.4 Luas Permukiman Kumuh Di Kota Surabaya

No	Tahun	Luas
1.	2018	83.17
2.	2019	43.46
3.	2020	38.00

Sumber: Dokumen Internal Litbang

Program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya, bahwa dalam rangka peningkatan kondisi fisik rumah bagi keluarga miskin di Kota Surabaya khususnya yang menempati rumah tidak layak huni agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan lebih berdaya dalam kehidupan masyarakat. Diharapkan dengan adanya aturan dasar terkait program ini dapat membantu dalam mewujudkan rumah layak huni.

Program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) ini merupakan salah satu program bantuan sosial melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertahanan (DPRKPP) Kota Surabaya yang diluncurkan pada tanggal 31 Maret 2021. Program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) diluncurkan sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam mendorong prakarsa masyarakat melalui program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sehingga dapat mengurangi permukiman kumuh di kota surabaya.

Program ini memberikan bantuan berupa pembangunan rumah layak huni yang dibangun atau terletak diatas tanah milik masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dalam pelaksanaan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), pemerintah kota surabaya menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Armuji selaku Wakil Walikota Surabaya mengatakan Pemkot Surabaya sudah mempersiapkan anggaran sebesar Rp120 miliar untuk mewujudkan target rumah tidak layak huni pada tahun ini, Minggu (21/5/2023).” (Sumber: <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/pemkot-surabaya-alokasikan-rp120-miliar-untuk-perbaikan-rutilahu/> , diakses pada tanggal 28 September 2023).

Dalam berita suarasurabaya.net diatas bahwasannya Wakil Walikota Surabaya menyatakan dana untuk perbaikan rumah tidak layak huni pada tahun 2023 yakni sebesar Rp120 miliar. Setiap rumah yang mendapatkan bantuan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) akan menerima sebesar 20-35 juta tergantung tingkat keparahan rumah yang akan diperbaiki. Dalam proses memperbaiki rumah tidak layak huni membutuhkan waktu kurang lebih 20 hari pengerjaan.

Tabel 1. 5 Jumlah Perbaikan Program Rutilahu tahun 2022

No	Kecamatan	Unit
1.	Asemrowo	13
2.	Benowo	30
3.	Bubutan	22
4.	Bulak	18
5.	Dukuh pakis	23
6.	Gayungan	28
7.	Genteng	29
8.	Gubeng	33
9.	Gunung Anyar	24
10.	Jambangan	20
11.	Karang Pilang	22
12.	Kenjeran	33
13.	Krembangan	40
14.	Lakarsantri	44
15.	Mulyorejo	37
16.	Pabean Cantian	17
17.	Pakal	28
18.	Rungkut	41
19.	Sambikerep	31
20.	Sawahan	44
21.	Semampir	29
22.	Simokerto	40
23.	Sukoliloo	40
24.	Sukomanunggal	28

No	Kecamatan	Unit
25.	Tambaksari	53
26.	Tandes	43
27.	Tegalsari	40
28.	Tenggilis Mejoyo	22
29.	Wiyung	29
30.	Wonokromo	26
31.	Wonocolo	23
Total		950

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan

Adapun kriteria untuk mendapatkan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yakni rumah yang dimiliki mempunyai kondisi kurang layak, dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak. Sedangkan persyaratan bagi penerima manfaat program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) salah satunya harus memiliki kartu tanda penduduk atau kartu keluarga serta berdomisili di rumah yang telah diusulkan dan bukti dengan surat keterangan dari kelurahan, dan belum menerima program perbaikan rumah tidak layak huni.

Dalam proses pelaksanaan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dinas DPRKPP tentunya memprioritaskan masyarakat berpenghasilan rendah atau belum pernah mendapatkan program Rutilahu.

“Irvan selaku kepala Dinas DPRKPP menyatakan bahwa para penerima program Rutilahu ini tidak sembarangan. Sebab, ada kriteria dan syarat yang harus dipenuhi. Khusus untuk kriteria dan syarat yang harus dipenuhi. Khusus untuk kriterianya adalah penduduk kota Surabaya yang masuk dalam data MBR dan belum pernah mendapat bantuan perbaikan Rutilahu, kecuali untuk korban bencana, Sabtu (5/3/2022).” (Sumber: <https://www.antaraneews.com/berita/2741273/program-rutilahu-di-surabaya-diprioritaskan-untuk-warga-mbr> diakses pada tanggal 27 September 2022).

Dalam berita antaranews.com diatas menunjukkan bahwa irvan selaku kepala dinas DPRKPP bahwasannya dalam penerimaan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) lebih memprioritaskan masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tentunya masyarakat yang belum menerima bantuan

perbaikan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Dengan adanya prioritas dalam program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) diharapkan pemerintah Kota Surabaya dapat menjalankan program tersebut secara terencana untuk mencapai tujuan. Sesuai dengan pengertian implementasi program menurut Van Horn Meter yang dikutip oleh (Andani et al., 2019) menyatakan bahwa implementasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang bermaksud untuk mencapai tujuan. Adapun definisi menurut Grindle yang dikutip oleh (Ikramullah, 2021) mengatakan bahwa implementasi merupakan cara yang kemudian dilakukan untuk kepentingan dan berusaha mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut David C. Korten dalam (Bahri et al., 2020), implementasi program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat tiga indikator yaitu kesesuaian program dengan kelompok sasaran, kesesuaian program dengan organisasi pelaksana, kesesuaian kelompok sasaran dengan organisasi.

Adanya penelitian terdahulu yang menjadi bahan rujukan peneliti yaitu milik Ramdani, (2022) yang berjudul Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rs-Rtlh) Di Desa Jambuluwuk Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. Dalam penelitian tersebut terdapat hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ditemukan beberapa persoalan terkait penyelenggaraan program RS-RTLH di Desa Jambuluwuk seperti belum optimalnya kualitas sumber daya manusia Karena dalam pencapaian pelaksanaan perlu adanya keterlibatan dari masyarakat ataupun keterlibatan dari perangkat Desa Jambuluwuk dan LPM yang berperan penting dalam proses pencapaian

pelaksanaan program RS-RTLH agar berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada hambatan apapun.

Proses implementasi program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sudah terlaksana, akan tetapi masih terdapat sedikit hambatan. Dalam pelaksanaan program, tidak selamanya berjalan lancar sebagaimana diharapkan. Ada kalanya program yang diimplementasikan mengalami kegagalan, hambatan dan penyimpangan (Sufiadi, 2015). Hal ini sejalan dengan pernyataan Kabid Kesejahteraan Sosial (Dinsos) Kota Surabaya dalam berita jatim.jpnn.com yang menyebutkan masih terdapatnya kendala terkait sengketa tanah.

“Yang diajukan ini adakalanya masih bermasalah status tanahnya. Permasalahan paling banyak itu sengketa tanah dengan keluarga, ada juga dengan instansi. Juga ada yang bukan tanahnya pribadi”. (<https://jatim.jpnn.com/dadi-omongan/6275/dinsos-surabaya-temukan-banyak-tanah-rutilahu-yang-masih-sengketa>, diakses pada 29 September 2023)

Dalam berita diatas dinyatakan bahwasannya masih ada hambatan terkait sengketa tanah dari masyarakat yang mengajukan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), sengketa tanah terjadi diantara keluarga atau dengan instansi, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) karena tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Dalam upaya menyelesaikan hambatan, maka proses perbaikan tidak akan langsung dilakukan melainkan harus turun ke lokasi untuk mengecek status tanah. Proses pengecekan ini dilakukan guna untuk mengklasifikasikan mana saja pengajuan yang sudah memenuhi syarat permohonan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Pemerintah Surabaya diharapkan dapat terus

melakukan pemetaan agar penerima bantuan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dapat tepat sasaran.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Anggota komisi C DPRD Surabaya Endy Suhadi ketika ditemui oleh pihak jawapos.

“ia mengatakan hingga kini, pihaknya belum mendapatkan secara resmi dari pemkot surabaya terkait jumlah yang sudah tersentuh program Rutilahu. Politikus Gerindra itu menuturkan, apabila tersisa 1.500 rumah yang belum mendapatkan Rutilahu. pemkot surabaya perlu memaparkan data rumah mana yang akan di Rutilahu. Karena ditargetkan selesai November. Nah ini sudah masuk September, berarti kurang September, Oktober, dan November. Kurang tiga bulan juga, paling tidak sebulan ada 500 rumah yang di Rutilahu, apakah nutut?” (<https://www.jawapos.com/surabaya-raya/012881159/tersisa-1500-rumah-dprd-komisi-c-minta-pemkot-surabaya-matangkan-pemetaan-program-rutilahu>, diakses pada 10 Oktober 2023)

Dalam berita Jawapos.com diatas menyatakan bahwasannya sampai bulan September masih terdapatkan 1.200 rumah dari target 2.700 rumah. Itu artinya masih terdapat 1500 rumah yang masih belum diguyur program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Sedangkan target untuk penyelesaian program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) adalah bulan November 2023. Oleh karena itu Anggota komisi C DPRD Surabaya Endy Suhadi meminta Pemkot Surabaya untuk mematangkan pemetaan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Sehingga bisa mengetahui masyarakat berpenghasilan rendah yang belum menerima program perbaikan rumah tidak layak huni.

Tabel 1.6 Target dan Realisasi Program Rutilahu

No	Tahun	Target	Realisasi
1.	2021	623	623
2.	2022	950	950
3.	2023	2700	1200

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan

Pada tabel diatas menunjukkan bahwasannya pada tahun 2021 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan menargetkan sebanyak 623 telah terealisasi sesuai dengan target tersebut. Hal itu juga terjadi pada tahun 2022 yang dimana realisasi terlaksana sesuai dengan target. Namun pada tahun 2023 hingga awal bulan November masih terealisasi sebanyak 1200 dari target 2700. Penetapan terkait jumlah target tiap tahun disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran dari APBD. Hal tersebut disampaikan oleh ibu Fika selaku staff dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan pada saat wawancara pendahuluan.

Hambatan lain dalam pelaksanaan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) juga disebabkan karena belum matangnya pemetaan yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya dalam pelaksanaan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), masih banyak terdapat masyarakat berpenghasilan rendah yang sampai saat ini belum menerima bantuan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Hal tersebut seperti yang dinyatakan oleh Romlah warga Surabaya yang dikutip dalam dprd.jatimprov.go.id

“Dengan masuk daftar MBR kota Surabaya saya berharap rumah saya masuk program rutilahu yang akan dibedah oleh Pemkot Surabaya. Namun, sampai saat ini saya tak masuk sama sekali dalam program itu. Bahkan, nama saya hilang dalam daftar MBR tersebut.”. (Sumber: <https://dprd.jatimprov.go.id/berita/11612/tak-semua-terima-bantuan-data-mbr-di-kota-surabaya-banyak-yang-hilang>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023)

Berita diatas menjadi bukti bahwasannya tidak semua masyarakat berpenghasilan rendah dikota surabaya menerima program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Seperti yang dikatakan oleh Romlah yang merupakan masyarakat berpenghasilan rendah namun belum juga mendapat bantuan program

perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bahkan nama Romlah hilang dari daftar MBR. Dengan adanya hambatan tersebut merupakan tugas pemerintah untuk merespon terhadap keluhan masyarakat berpenghasilan rendah yang belum menerima program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).

Terhambatnya pelaksanaan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) juga terjadi dikarenakan beberapa kelompok masyarakat yang ikut serta dalam pelaksanaan tidak memiliki dasar konstruksi sehingga mengakibatkan lambatnya pengerjaan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Hal ini diketahui melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh penulis dengan ibu Fika Rahmawati selaku staff Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan pada 25 Oktober 2023:

“Karena perbaikan rutilahu merupakan pekerjaan yang dilakukan secara swakelola tipe iv yaitu bekerja sama dengan kelompok masyarakat yang berasal dari masyarakat biasa. Maka kendala awal adalah kelompok masyarakat tidak memiliki basic ilmu konstruksi sehingga pelaksanaannya kadang diserahkan begitu saja kepada tukangnyanya Disamping itu kadang mereka tidak bisa membaca gambar desain perencanaan yang telah disetujui sehingga item pekerjaannya tidak sesuai.

Dari wawancara pendahuluan tersebut didapatkan informasi terkait hambatan yang terjadi pada pelaksanaan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yaitu dikarenakan kelompok masyarakat yang tidak memiliki dasar konstruksi sehingga pelaksanaannya langsung diserahkan begitu saja kepada tukangnyanya, namun terdapat hambatan lain juga seperti tidak bisa membaca gambar konstruksi yang telah disetujui sehingga dapat mengakibatkan item pekerjaan yang kurang sesuai.

Salah satu permasalahan yang dirasakan oleh warga Asemrowo, dimana rumahnya yang hampir ambruk belum ada tindakan dari pemerintah Kota Surabaya.

Eko Wahyudi LPMK Asemrowo mengaku telah mendapatkan aduan warga dan telah diteruskan di Kelurahan Genting Kalianak dan Kelurahan Asemrowo namun hasilnya nihil. Seperti yang dikatakan oleh Anggota Komisi B DPRD Surabaya Zuhrotul Mar'ah.

“Saya terima laporan ada rumah yang kena dampak dari rutilahu. Namun saya menyayangkan sudah sebulan lebih tapi belum ada tindak lanjut untuk segera dibangun.” (Sumber: <https://www.rri.go.id/daerah/95628/warga-menanti-tanggung-jawab-pemkot-surabaya-akibat-rutilahu>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023.)

Dalam berita diatas menyatakan bahwa program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) meninggalkan dampak seperti laporan dari Diah Rusdiana warga asemrowo kepada Anggota Komisi B DPRD Surabaya Zuhrotul Mar'ah yang mengatakan bahwa sudah sebulan lebih rumahnya terkena dampak dari program Rutilahu namun sangat disayangkan belum ada tindak lanjut dari pemerintah. Selain itu Di Kelurahan Asemrowo juga masih ditemui permukiman kumuh. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Machfud mantan kapolda Jawa Timur.

"Masih terdapat banyak permukiman kumuh di Kota Surabaya, seperti kampung yang ada di Asemrowo yang sungainya penuh dengan sampah. Tidak hanya Asemrowo daerah Krembangan juga terdapat permukiman yang kumuh." (Sumber: <https://www.medcom.id/pilkada/news-pilkada/ObzZBd1b-machfud-bicara-kampung-kumuh-surabaya-eri-pamer-ratusan-penghargaan>, diakses pada tanggal 27 Juni 2024)

Dalam berita diatas menyatakan bahwa masih terdapat permukiman kumuh yang ada di Kelurahan Asemrowo. Maka dari itu Kelurahan Asemrowo merupakan kelurahan dengan permasalahan yang cukup kompleks terkait permukiman kumuh dan termasuk kedalam prioritas penataan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman di Kota Surabaya. Pada wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh penulis dengan ibu Fika selaku staff dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan menyatakan bahwasannya lokasi kelurahan

asemrowo saat ini perlu dilakukan perbaikan rumah kurang layak huni untuk mengurangi permukiman kumuh.

“Memang sampai saat ini terkait permukiman kumuh masih menjadi masalah yang harus segera dituntaskan, dan salah satu kelurahan yang menjadi perhatian kita saat ini yaitu kelurahan Asemrowo. Karena lokasi tersebut dekat dengan pusat Kota Surabaya sehingga perlu perbaikan untuk menciptakan nilai keindahan dari Kota Surabaya”

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dengan fenomena yang ada penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus pada implementasi program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) guna mengatasi permukiman kumuh di kelurahan asemrowo Kota Surabaya. Terdapat tiga indikator menurut David C. Korten yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu Kesesuaian program dengan kelompok sasaran, Kesesuaian program dengan organisasi pelaksana, Kesesuaian kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana. Dengan demikian, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Dalam Mengatasi Permukiman Kumuh Di Kelurahan Asemrowo Kota Surabaya”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di bahas sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Dalam Mengatasi Permukiman Kumuh Di Kelurahan Asemrowo Kota Surabaya?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Program Perbaikan Rumah Tidak Layak

Huni (Rutilahu) Dalam Mengatasi Permukiman Kumuh Di Kelurahan Asemrowo Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai bentuk kepedulian akademis terhadap permasalahan mengenai Permukiman Kumuh Di Kelurahan Asemrowo Kota Surabaya. Mengingat masih banyaknya permukiman kumuh. Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan acuan, referensi dan sumber teori untuk pembelajaran di masa mendatang.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan keilmuan tentang Implementasi Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Dalam Mengatasi Permukiman Kumuh Di Kelurahan Asemrowo Kota Surabaya.

2. Bagi Pemerintah Surabaya

Bagi Pemerintah Kota Surabaya hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan mengenai Permukiman Kumuh di kelurahan asemrowo kota Surabaya.

3. Bagi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Sebagai bahan referensi yang dapat dimanfaatkan sebagai acuan oleh peneliti lainnya yang ingin mengembangkan kajian serupa di masa mendatang, serta untuk menambah referensi perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik